



# DIDAKTIKA

JURNAL PENELITIAN DAN KAJIAN ILMIAH KEPENDIDIKAN

*Students' Self-Esteem at School: the Risk, the Challenge, and the Cure.*

**Prihadi Kususanto, Melissa Chua**

*Constraints and Improvement: a Case Study of The Indonesia's International Standard School in Improving its Capacity Building*

**Bambang Sumintono, Hamdan Said and Nora Mislan**

*The Competence of School Principals; What Kind of Need Competence for School Success?*

**Mustamin, M. Al Muz-zammil Bin Hj. Mohd Yasin**

*Laboratory Quality Management Requirements of Engineering at the Polytechnics Ministry of Higher Education Malaysia*

**Zunuwanas Mohamad, Ruhizan Mohammad Yasin, Mohd Nizam Ab Rahman**

*Ajaran Moral Dalam The Count of Monte Cristo Karya Alexander Dumas: Sebuah Kajian Sosiologis*

**Nuri Fainuddin**

*Efektifitas Internet Kampus Dalam Menunjang Pembelajaran Bahasa Inggris Mahasiswa di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*

**Azwar Abbas**

*Kontribusi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pengembangan Karakter Bangsa: Prospek Dan Tantangan Di Tengah Masyarakat Yang Multikultural*

**Dikdik Baehaqi Arif**

*Peningkatan Prestasi dan Kemandirian Belajar Mahasiswa Calon Guru Fisika pada Mata Kuliah Mekanika Melalui Pendekatan Reciprocal Teaching*

**Fajar Fitri**

*Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Kualitas Lulusan Pendidikan*

**Kusno Effendi**

*Guidance and Counseling is Pro-Active Effort in Facilitating the Individual to Achive an Optimal Development.*

**Said Alhadi**

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA

<b>DIDAKTIKA</b> Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Kependidikan	<i>Vol.</i> 1	<i>No.</i> 1	<i>Hal.</i> 1- 136	<i>Yogyakarta</i> April 2012	<b>ISSN</b> 1411 - 6561
---	------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------	----------------------------

# DAFTAR ISI

<i>Pengantar</i> .....	i
<i>Dewan Redaksi</i> .....	ii
<i>Daftar Isi</i> .....	iii
<i>Students' Self-Esteem at School: the Risk, the Challenge, and the Cure.</i> <b>Prihadi Kususanto, Melissa Chua</b> .....	1
<i>Constraints and Improvement: a Case Study offThe Indonesia's International Standard School in Improving its Capacity Building</i> <b>Bambang Sumintono, Hamdan Said and Nora Mislan</b> .....	23
<i>The Competence of School Principals; What Kind of Need Competence for School Success?</i> <b>Mustamin, M. Al Muz-zammil Bin Hj. Mohd Yasin</b> .....	41
<i>Laboratory Quality Management Requirements of Engineering at the Polytechnics Ministry of Higher Education Malaysia</i> <b>Zunuwanas Mohamad, Ruhizan Mohammad Yasin, Mohd Nizam Ab Rahman</b> .....	57
<i>Ajaran Moral Dalam The Count of Monte Cristo Karya Alexander Dumas: Sebuah Kajian Sosiologis</i> <b>Nuri Fainuddin</b> .....	65
<i>Efektifitas Internet Kampus Dalam Menunjang Pembelajaran Bahasa Inggris Mahasiswa di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta</i> <b>Azwar Abbas</b> .....	75
<i>Kontribusi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pengembangan Karakter Bangsa: Prospek Dan Tantangan Di Tengah Masyarakat Yang Multikultural</i> <b>Dikdik Baehaqi Arif</b> .....	85
<i>Peningkatan Prestasi dan Kemandirian Belajar Mahasiswa Calon Guru Fisika pada Mata Kuliah Mekanika Melalui Pendekatan Reciprocal Teaching</i> <b>Fajar Fitri</b> .....	99
<i>Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Kualitas Lulusan Pendidikan</i> <b>Kusno Effendi</b> .....	109
<i>Guidance and Counseling is Pro-Active Effort in Facilitating the Individual to Achive an Optimal Development.</i> <b>Said Alhadi</b> .....	127

# KONTRIBUSI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA: PROSPEK DAN TANTANGAN DI TENGAH MASYARAKAT YANG MULTIKULTURAL<sup>1</sup>

*Dikdik Baehaqi Arif<sup>2</sup>*

*Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan*

## ABSTRAK

Sebagai program kurikuler, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan wahana pengembangan karakter bangsa dalam masyarakat yang multikultural melalui tiga cara. *Pertama*, ke dalam materi kajian mata kuliah pendidikan kewarganegaraan disisipkan nilai-nilai karakter bangsa yang penting dimiliki oleh setiap warga negara sebagai karakter individu agar pada gilirannya dapat terakumulasi menjadi karakter bangsa. *Kedua*, kelas pendidikan kewarganegaraan difungsikan sebagai laboratorium demokrasi, yang mengubah proses pembelajaran yang dominative menjadi integrative, dan *ketiga* memerankan masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar pendidikan kewarganegaraan.

## ABSTRACT

*As the curricular programs, civic education courses can be used as a vehicle for the nation's character development in a multicultural society in three ways. First, in a matter of civic education courses inserted the nation's character values that are important possessed by every citizen as an individual character that in turn can accumulate into the nation's character. Second, civic education classes functioned as laboratories of democracy, which transform the process from dominative to integrative, and three plays society and environment as a source of civic education.*

**Keywords :** *civic education, citizenship education, multicultural society, nation's character, laboratory democracy.*

## A. Pendahuluan

Realitas kebhinnekaan Indonesia sebagaimana tergambar dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang meniscayakan pentingnya sebuah pemahaman bahwa sekalipun satu,

---

1 Bagian besar naskah ini pernah disampaikan penulis dalam Diskusi Ilmiah Dosen PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Sabtu, 14 Mei 2011 dalam rangka Diseminasi hasil Pentaloka Doswar yang diikuti penulis di Dodik Bela Negara Rindam IV/Diponegoro, Magelang 11-13 April 2011.

2 Dikdik Baehaqi Arif; *Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Pramuka No. 42 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta 55161, e-mail: dik2baehaqi@yahoo.com*

tidak boleh dilupakan bahwa sesungguhnya bangsa ini berbeda-beda dalam suatu keragaman. Secara historis, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang kuat tidaklah lahir semata-mata dari semangat ketunggalan, melainkan pengakuan adanya pluralitas (kemajemukan) dan heterogenitas (keanekaragaman) sekaligus kesediaan untuk menghormati pluralitas dan heterogenitas itu (Arif, 2008). Karena itu, kebhinnekaan ini perlu dipahami oleh warga negara sebagai suatu konstruksi sosial bangsa Indonesia yang dicita-citakan (*imagined community*) sebab para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak akan tahu dan tidak kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Semuanya menjadi konsep komunitas politik ketika ditiupkan konsep sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka yang pada saat yang sama komunitas itu berubah menjadi sesuatu yang terbayang berada dalam bangunan bayang-bayang citra sebagai komunitas politik dan ingin menyatukan semua yang berada dalam batas-batas kesamaan itu.

Namun, pada sisi yang lain, ia juga menimbulkan dampak negatif, karena pada saat masyarakat Indonesia tidak saling mengenal sebagian besar anggota lain, tidak bertatap muka dengan mereka, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka justru seringkali menjadi pemicu timbulnya konflik antarkelompok masyarakat, yang pada gilirannya, konflik-konflik antarkelompok masyarakat tersebut akan melahirkan distabilitas keamanan, sosio-ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial (*social disharmony*) (Arif, 2008). Berbagai konflik yang muncul akhir-akhir ini bisa jadi dipicu oleh ketidakmampuan kita memahami perbedaan. Sebagai contoh, kebhinnekaan kita terusik dengan berbagai konflik bernuansa agama, seperti peristiwa di Parung Bogor, Jakarta, Bandung, Lombok, Cikeusik, atau di Sampang Madura yang menimbulkan kerugian fisik maupun non fisik, dan sampai saat ini belum ditemukan penyelesaian yang bijak.

Selain dihadapkan pada berbagai konflik, dalam konteks kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, dewasa ini kita juga dihadapkan pada berbagai krisis seperti krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, krisis kebudayaan, krisis keteladanan, terutama krisis moral (Kaelan, 2011). Bahkan Kaelan (2011) menambahkan bahwa kini, kita dihadapkan pada semakin lunturnya nasionalisme bangsa, lemahnya penegakan hukum, korupsi yang semakin merebak dengan wajah baru, kolusi dan nepotisme dengan wajah demokrasi, primordialisme, etika politik kalangan elit kita terutama para penyelenggara negara dewasa ini sangat mengecewakan rakyat.

Kenyataan di atas disinyalir sebagai akibat dari lemahnya karakter bangsa. Karena itu, menjadi sangat penting untuk mengembangkan (kembali) karakter bangsa yang unggul. Proses semacam ini tidak bisa melepaskan diri dari proses pendidikan. Dalam hal ini, penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi wahana pengembangan karakter mahasiswa secara individual yang pada gilirannya akan berakumulasi menjadi karakter bangsa yang bermartabat.

Permasalahannya adalah bagaimana memformulasikan pengembangan karakter bangsa itu di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural? dan bagaimana pula praksis pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang sebaiknya dilakukan untuk pengembangan karakter bangsa?

## **B. Karakter Bangsa dalam Masyarakat Multikultural Indonesia**

Negara bangsa Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok-kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen (aneka ragam) (Kusumohamidjojo, 2000:45). Realitas pluralitas dan heterogenitas tersebut tergambar dalam prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*. Hefner (2007:16) mengilustrasikan Indonesia sebagaimana juga Malaysia memiliki warisan dan tantangan pluralisme budaya (*cultural pluralism*) secara lebih mencolok, sehingga dipandang sebagai “lokus klasik” bagi bentukan baru “masyarakat majemuk” (*plural society*). Kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, *pertama* secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan *kedua* secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 2007:33).

Namun demikian, kenyataan empirik tersebut tidak diikuti oleh kebijakan yang menggambarkan kemajemukan itu. Pengalaman Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, khususnya pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno dan masa Orde Baru Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada politik monokulturalisme (Azra, 2006:152). Dalam politik ini, yang diberlakukan bukannya penghormatan terhadap keragaman (kebhinnekaan atau multikulturalisme), tetapi sebaliknya adalah keseragaman (monokulturalisme) atas nama stabilitas untuk pembangunan (Azra, 2006:152).

Berakhirnya sentralisasi Orde Baru yang memaksakan monokulturalisme, pada gilirannya telah memunculkan kesadaran akan pentingnya memahami kembali kebhinnekaan Indonesia. Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi itu adalah sebuah “masyarakat multikultural Indonesia” (Arif, 2008). Berbeda dengan masyarakat majemuk yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa, masyarakat multikultural dikembangkan dari konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat (Suparlan, 2005:98). Masyarakat multikultural ini mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada, baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat (Azra, 2006:154, Suparlan 2005). Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya dimana mereka menjadi bagian darinya. Dengan demikian, corak masyarakat Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika* bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Definisi multikulturalisme sebagai basis masyarakat multikultural yang cukup lengkap dikemukakan oleh Lawrence A Blum sebagai berikut:

Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri (Blum, 2001:16).

Dalam konsep multikulturalisme di atas, tercakup tiga sub nilai. *Pertama*, menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang; *Kedua*, menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang (dan dari) kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya; *Ketiga*, menilai dan merasa senang dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan itu sendiri, yaitu memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara (Arif, 2008).

Sebagaimana dikemukakan di atas, potensi konflik dalam masyarakat yang multikultural cukup besar, karena itu pendidikan yang mampu membangun karakter warga negara yang cinta damai mutlak diperlukan. Sebab tanpa

kepemilikan karakter tersebut, sulit bagi bangsa dan negara untuk tetap bertahan menghadapi berbagai konflik yang ada. Pendidikan adalah jembatan paling penting untuk membentuk karakter masyarakat yang multikultural. Pernyataan Ellen G. White yang dikutip Hidayatullah (2011) menyebutkan bahwa pembangunan karakter adalah usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia. Pembangunan karakter adalah tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar. Pernyataan tersebut memberikan penguatan bahwa pembangunan karakter tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Bahkan Stiles (Hidayatullah, 2011) menyatakan bahwa pembangunan karakter tidak dapat dilakukan dengan serta merta tanpa upaya sistematis dan terprogram sejak dini.

Bila dicermati fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sesungguhnya bermuara pada upaya pembangunan karakter bangsa. Secara rinci bunyi fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut adalah:

Sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Apa sebenarnya karakter itu? Dilihat dari asal katanya, karakter berasal dari kata Yunani *charaktêr* yang mengacu kepada suatu tanda yang terpatri pada sisi sebuah koin. Karakter menurut Kalidjernih (2010) lazim dipahami sebagai kualitas-kualitas moral yang awet yang terdapat atau tidak terdapat pada setiap individu yang terekspresikan melalui pola-pola perilaku atau tindakan yang dapat dievaluasi dalam berbagai situasi. Karakter adalah *the combination of qualities and personality that makes one person or thing different from others* (Hidayatullah, 2011). Dalam Kamus Poerwadarminta, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain. Dalam pandangan Purwasasmita (2010) disebut watak jika telah berlangsung dan melekat pada diri seseorang. Dengan demikian, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Secara psikologis dan *socio-cultural*, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial budaya (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan *socio-cultural* tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kelompok olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*) (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). *Olah hati* berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/keimanan menghasilkan karakter jujur dan bertanggung jawab. *Olah pikir* berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif menghasilkan pribadi cerdas. *Olah raga* berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas menghasilkan sikap bersih, sehat, dan menarik. *Olah rasa dan karsa* berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, citra, dan penciptaan kebaruan menghasilkan kepedulian dan kreatifitas.

Dalam konteks suatu bangsa, karakter dimaknai sebagai nilai-nilai keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara dan kemudian mengejawantah sebagai personalitas dan identitas kolektif bangsa (PP Muhammadiyah, 2009). Karakter berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain.

Karena itu, dalam pemaknaan demikian, manusia Indonesia yang berkarakter kuat adalah manusia yang memiliki sifat-sifat: religius, moderat, cerdas, dan mandiri. Sifat *religius* dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong menolong, dan toleran. Sifat *moderat* dicirikan oleh sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi dan ruhani, serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan. Sifat *cerdas* dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju. Dan sikap *mandiri* dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antarperadaban bangsa-bangsa.

Untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang kuat, Kaelan (2011) berpendapat seyogyanya didasarkan pada dasar filosofis bangsa. Sebab



bangsa Indonesia telah menentukan jalan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu dasar kenegaraan, *filosofischegrondslag* atau dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara, *filosofischegrondslag*, Pancasila bukan merupakan suatu preferensi, melainkan sudah merupakan suatu realitas objektif bangsa dan negara Indonesia, yang memiliki dasar legitimasi yuridis, filosofis, politis, historis dan kultural.

Di sisi lain, menyikapi berbagai konflik yang muncul dalam masyarakat yang multikultural, Budihardjo (2011) menegaskan perlunya membangun budaya *the power of love* yang sejalan dengan tujuan pembangunan, yaitu menciptakan kedamaian (*peace*), kesehatan (*health*), kesejahteraan (*prosperity*), dan kebahagiaan (*happines*). Lebih lanjut, Budiardjo (2010) memandang bahwa dalam masyarakat yang multikultural perlu dibangun karakter masyarakat yang saling percaya (*trust*), tulus dan jujur (*integrity*), keluwesan dan kelembutan (*tolerance*), dan semangat untuk bersatu (*spirit to unite*).

### **C. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pembangunan Karakter Bangsa**

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, berbagai krisis yang dikemukakan di atas disinyalir sebagai bagian dari kegagalan pendidikan karakter dalam masyarakat yang multikultural. Mempertegas hal itu, Hidayatullah (2011) menyebutkan dua sebab gagalnya pendidikan karakter bagi warga negara. *Pertama*, sistem pendidikan yang kurang menekankan pembangunan karakter tetapi lebih menekankan pengembangan intelektual, seperti sistem evaluasi pendidikan yang menekankan aspek kognitif/akademik dalam bentuk ujian nasional. *Kedua*, kondisi sosial yang kurang mendukung pembangunan karakter yang baik.

Berdasarkan kerangka di atas, selanjutnya bagaimana peranan dan strategi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam pembangunan karakter bangsa? Secara terminologis, Zamroni (dalam ICCE, 2003) berpendapat bahwa PKn adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy* dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Cholisin (Samsuri, 2011) yang mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Sistem pendidikan Indonesia mengatur bahwa kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. (Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Ketentuan ini sesungguhnya menunjukkan bahwa PKn menempati kedudukan yang strategis dalam upaya pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Secara paradigmatik Winataputra (2001), mengemukakan bahwa PKn memiliki tiga domain, yakni 1) domain akademis; 2) domain kurikuler; dan 3) domain aktivitas sosial-kultural, yang secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan warga negara yang baik (*good citizens*) yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai, sikap dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*). Domain akademis adalah berbagai pemikiran tentang PKn yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Domain kurikuler adalah konsep dan praksis PKn dalam dunia pendidikan formal dan nonformal. Domain sosial cultural adalah konsep dan praksis PKn di lingkungan masyarakat (Wahab dan Sapriya, 2011:97).

Sebagai program kurikuler, mata kuliah PKn di perguruan tinggi adalah bentuk revisi dari Pendidikan Kewiraan. Sejak tahun 2000-an, substansi mata kuliah Pendidikan Kewiraan sebagai Pendidikan Pendahuluan Bela Negara direvisi dan selanjutnya namanya diganti menjadi PKn berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No.267/Dikti/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Perubahan ini dilakukan karena mata kuliah Pendidikan Kewiraan terlalu condong atau lebih berorientasi pada aspek bela negara dalam konteks memenuhi kebutuhan pertahanan. Dalam analisis Cipto, et all (2002:ix) metode pengajaran yang diterapkan dalam Pendidikan Kewiraan lebih bersifat indoktrinatif yang hanya menyentuh aspek kognitif, sedangkan aspek sikap dan perilaku belum tersentuh.

Memperjelas pandangan tersebut, Tukiran, dkk (2009:12) memerinci kekurangberhasilan Pendidikan Kewiraan yang disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, secara substantif, Pendidikan Kewiraan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Materi-materi yang ada umumnya terpusat pada pembahasan yang idealistik, legalistik, dan normatif. *Kedua*, walaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi pendidikan demokrasi dan PKn, potensi itu tidak berkembang karena pendekatan dan pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis dan tidak partisipatif. *Ketiga*, ketiga subjek itu lebih bersifat teoretis daripada praktis.

Substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan makin disempurnakan dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38/Dikti/2002 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang memiliki visi, misi, dan standar kompetensi sebagai berikut:

- a. Visi kelompok MPK: sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.
- b. Misi kelompok MPK: membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.
- c. Standar Kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya, dan kewarganegaraan dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang mantap; berpikir kritis: bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan luas; dan bersikap demokratis yang berkeadaban.

Sedangkan kompetensi dasar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing: berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Menurut Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pentingnya bela negara oleh warga negara melalui penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan semakin ditegaskan dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam rumusan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dapat ditemui bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara (ayat 1), sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara tersebut diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan kewarganegaraan;
- b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Selanjutnya bagaimana strategi PKn untuk pembangunan karakter bangsa? Mengutip pendapat Winataputra (2005), agar PKn dapat benar-benar memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan karakter bangsa, tiga hal perlu kita cermati, yaitu *“curriculum content and instructional strategies; civic education classroom; and learning environment.*

*Pertama*, dilihat dari isi kurikulum, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 substansi kajian mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ialah: Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM dan *Rule of Law*, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik Indonesia, dan Geostrategi Indonesia. Apabila dicermati, substansi kajian PKn tersebut dapat dijadikan dasar dalam pembangunan karakter mahasiswa sebagai warga negara yang pada gilirannya dapat terakumulasi menjadi karakter bangsa. Ke dalam materi-materi tersebut dapat diintegrasikan nilai-nilai karakter bangsa sebagaimana disusun oleh Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional (2011) sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1. Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

NILAI	DESKRIPSI
Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
Semangat Kebangsaan	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
Bersahabat/Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
Tanggung jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber: Pusat Kurikulum Kemendiknas, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, (2010:9).

Dalam konteks pengembangan isi kurikulum PKn ini, dosen dituntut untuk mampu bukan hanya memahami dan menyampaikan materi tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam setiap materi. Sehingga, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan atau keterampilan berkaitan dengan materi yang diajarkan, tetapi dalam dirinya terbangun kesadaran untuk memiliki karakter terbaik. Dosen juga dituntut untuk mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat yang memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara humanis dan bermakna.

*Kedua*, kelas PKn seyogyanya dilihat dan diperlakukan sebagai laboratorium demokrasi. Menurut Winataputra (2005) “... *laboratory for democracy where the spirit of citizenship and humanity emanating from the ideals and values of democracy are put into the actual practice by learners and teachers as well. In such a classroom learners and teachers should collaboratively develop and share democratic climate where decision making process is acquired and learned*”. Profil konseptual kelas PKn yang digagaskan di atas, harus dikembangkan untuk menggantikan kelas PKn saat ini yang bersifat lebih dominatif dan indoktrinatif. Untuk itu maka proses pembelajaran PKn perlu dikembangkan dengan menerapkan pendekatan belajar yang bersifat memberdayakan mahasiswa. Dengan demikian kelas PKn akan berubah dari yang selama ini bersifat “dominatif” menjadi “integratif”. Pendekatan pembelajaran yang disarankan untuk dikembangkan adalah yang berorientasi pada proses berpikir kritis (*critical thinking*) dan pemecahan masalah (*problem solving*).

Dan *ketiga*, pada saat bersamaan lingkungan masyarakat sekolah dan masyarakat yang lebih luas seyogyanya, juga dikondisikan untuk menjadi “*spiral global classroom*” (CICED, 1999:7 dalam Winataputra, 2005). Dengan demikian kesenjangan yang melahirkan kontroversi atau paradoksal antara yang dipelajari di sekolah dengan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dapat diminimumkan. Perlu disadari bahwa pembangunan karakter merupakan tugas dari semua pihak, mulai dari unsur lembaga pendidikan, orang tua, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu perlu dibangun kerjasama antara lembaga pendidikan dengan orang tua dan lembaga pendidikan dengan lingkungan masyarakat. Sehingga melalui kerjasama tersebut tidak akan terjadi lempar tanggung jawab kewenangan untuk melakukan pembinaan karakter, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Semua komponen merasa bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan karakter.

## Daftar Pustaka

- Arif, D.B. (2008). "Kompetensi Kewarganegaraan untuk Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia". *Acta Civicus: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1 (3) Oktober 2008.
- Azra, A. (2006). "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme". Dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Bogor: Brighten Press.
- Blum, L.A. (2001). "Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat Multikultural". Dalam May, Larry, Shari Collins-Chobanian, and Kai Wong (Eds). *Etika Terapan I: Sebuah Pendekatan Multikultural*. Terjemahan oleh Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Budihardjo, E. (2011). "Mengembalikan Bangsa Indonesia yang Cinta Damai di Tengah Krisis Multidimensi: Suatu Pendekatan Budaya". Bahan tayangan disampaikan dalam Pentaloka Doswar se-Jawa Tengah dan DIY di Dodik Bela Negara Resimen Kodam IV/Diponegoro Magelang, 12 April 2011.
- Cipto, B. *at all.* (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta: LP3 UMY.
- Hefner, R.W. (2007). *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Terjemahan oleh Bernardus Hidayat dari judul asli "The Politics of Multiculturalism, Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia". Yogyakarta: Kanisius.
- Hidayatullah, M.F. (2011). "Pendidikan Karakter dan Pengembangan Metode Pembelajaran Nilai". Bahan tayangan disampaikan dalam Pentaloka Doswar se-Jawa Tengah dan DIY di Dodik Bela Negara Resimen Kodam IV/Diponegoro Magelang, 12 April 2011.
- ICCE UIN. (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Prenada Media.
- Kaelan. (2011). "Etika Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia". Makalah disampaikan dalam Pentaloka Doswar se-Jawa Tengah dan DIY di Dodik Bela Negara Resimen Kodam IV/Diponegoro Magelang, 12 April 2011.
- Kalidjernih, F.K. (2010). "Situasionisme: Refleksi untuk Pendidikan Karakter di Indonesia", disampaikan dalam Seminar Aktualisasi Pendidikan Karakter yang diselenggarakan oleh Program Studi PKn SPs UPI, 15 November 2010.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

- Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Lemhanas. (1994). *Kewiraan untuk Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasikun. (2007). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: pt. RajaGrafindo Persada.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2009). *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia ke Depan*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Purwasasmita, M. (2010). "Memaknai Konsep Alam Cerdas dan kearifan Nilai Budaya Lokal dalam Pendidikan Karakter Bangsa", dalam *Prosiding Seminar Aktualisasi Pendidikan Karakter*, Bandung: Widya Aksara Press.
- Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Samsuri. (2011). "Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Kompetensi Warga Negara". Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Senin, 9 Mei 2011 di Kampus II UAD, Yogyakarta
- Suparlan, P. (2003) "Bhineka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Tahun XXVII, No.72.
- Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- Tukiran, dkk. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Bandung: Kerjasama Alfabeta dan UMP.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab, A. A dan Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra, U.S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS*. Disertasi pada PPS UPI, tidak diterbitkan.
- Winataputra, U.S. (2005). "Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Masyarakat Demokratis dan Berkeadaban: *Tinjauan Filosofis-Pedagogis*". Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Dosen Pendidikan Kewarganegaraan PTN dan PTS, *Ditjen Dikti*, untuk Wilayah Indonesia Barat. Hotel Dharma Deli, Medan 22 September 2005.